

PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG: STUDI PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2009-2013

Asep Mulyana

Fakultas Ekonomi Universitas Nurtanio Bandung

asepdiymulyana@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to determine the effect of the development of Regional Taxes and Regional Retribution on increasing Regional Original Revenue (PAD). The research method used is quantitative descriptive analysis. that is, the presentation of data in the form of numbers. This research consists of two independent variables, namely Regional Taxes and Regional Retribution. The classic assumption test used is normality test, multicollinearity autocorrelation test, and heteroscedasticity test. The data analysis model used is multiple linear regression analysis. The results showed the highest growth rate in 2011 reached 45.21% while the realization of PAD revenue which showed the lowest growth rate was in 2010 which was only 15.42%. The average growth of PAD revenue in Bandung in 2009-2013 was 22.19%, while in descriptive statistics it was Rp.812.20 billion. The test results show that the Regional Tax has a significant effect while the Regional Retribution has no significant effect on the Bandung City PAD. Simultaneously, Bandung City PAD is 100% influenced by regional taxes and retribution.*

Keywords: *Regional Taxes, Regional Retribution, Regional Income*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. yaitu penyajian data dalam bentuk angka-angka yang terdiri dari dua variabel bebas yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji autokorelasi uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasilnya menunjukkan tingkat pertumbuhan paling tinggi ada di tahun 2011 mencapai 45.21% sedangkan realisasi penerimaan PAD yang menunjukkan tingkat pertumbuhan paling rendah ada di tahun 2010 yang hanya 15.42%. Rata-rata pertumbuhan penerimaan PAD Kota Bandung tahun 2009-2013 adalah sebesar 22.19%, sedangkan pada statistik deskriptif sebesar Rp.812,20 milyar. Hasil pengujian menunjukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bandung. Secara simultan, PAD Kota Bandung 100% dipengaruhi oleh pajak dan retribusi daerah.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata di seluruh Indonesia dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang sangat penting dari pembangunan nasional. Untuk memperlancar pembangunan nasional, maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas.

Dalam prakteknya, Pemerintah Pusat memiliki kemampuan dari sisi mobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan Negara sedangkan Pemerintah Daerah dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber-sumber penerimaan sehingga pembiayaan daerah masih bergantung pada Pemerintah Pusat. Tekad Pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah, merupakan salah satu cara untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan Pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Pendapatan Asli Daerah yang sumbernya ada pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:178) pada dasarnya desentralisasi pembangunan ditunjukkan agar setiap daerah dapat menggunakan kewenangan yang lebih luas yang dimilikinya untuk menggali potensi ekonomi daerahnya. Dengan demikian, penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Marihot (2013:3) pemberlakuan Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah harus membayar Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang terutang.

Maka dari hal tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak-hak rakyatnya, dalam arti lain Pemerintah Daerah harus adil melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahan daerah itu sendiri.

Perluasan basis pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Sumber penerimaan Pajak Daerah yang diperoleh dari pajak Kota Bandung terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir. Selain perluasan Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga berperan penting dalam PAD. Retribusi Daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan.

Tujuan adanya peningkatan PAD adalah untuk mendorong perekonomian Kota Bandung melalui pembangunan sarana prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Masalah lainnya yang dihadapi pemerintah daerah mengenai layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:135).

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu, perlu dianalisis seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Kota Bandung itu sendiri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Munawir (1998) mendefinisikan Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan oleh sektor tertentu dalam tatanan infrastruktur pembangunan daerah. Dari berbagai jenis pendapatan daerah terdapat beberapa yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembangunan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan sendiri sebagai sumber utama pendapatan. Sumber itu dapat dipergunakan daerah sesuai dengan kebutuhannya. Daerah otonom seharusnya memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan harus menjadi sumber keuangan yang terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara yang kontribusi yang besar (Koswara, 2000). Kemampuan aparat pemerintah daerah di bidang akuntansi, manajemen keuangan daerah dan perencanaan (baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang) merupakan suatu tuntutan yang sangat wajar untuk mendukung usaha otonomisasi. Dengan demikian

warga masyarakat yang menikmati semua jasa suatu daerah dari kontribusi pendapatan di daerah.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata di seluruh Indonesia dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang sangat penting dari pembangunan nasional. Untuk memperlancar pembangunan nasional, maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas. Dalam prakteknya, Pemerintah Pusat memiliki kemampuan dari sisi mobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan negara, sedangkan Pemerintah Daerah dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber-sumber penerimaan sehingga pembiayaan daerah masih bergantung pada Pemerintah Pusat. Tekad Pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah, merupakan salah satu cara untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan Pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Pendapatan Asli Daerah yang sumbernya ada pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang bagi orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang terdiri dari dua variabel bebas yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memiliki hubungan langsung terhadap variabel terikat yaitu PAD. Menurut Sugiyono (2012:14) penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis

terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan fundamental Antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

Operasionalisasi variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep, dimana terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah lain terjadi dan atau variabel yang situasi dan kondisinya tergantung variabel lain. Variabel independen atau variabel bebas yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel (X) terdiri dari Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2).
2. Variabel (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah.

Pengujian regresi linier berganda dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yatu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, dan heteroskedastisitas (Ghozali, 2012)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari tahun 2009 - 2013 kemudian didapatkan hasil statistik deskriptif pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 1. *Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	5	272.66	1194.09	651.0920	383.59085
Retribusi Daerah	5	77.17	115.51	88.7680	15.42337
PAD	5	372.42	1442.78	812.2000	437.42135
Valid N (listwise)	5				

Dari hasil di atas menunjukkan jumlah pengukuran (N) adalah 5 tahun, nilai minimum (Minimum) pada Pajak Daerah adalah Rp.272,66 milyar, nilai maksimum (Maximum) adalah Rp.1.194,09 milyar, dan nilai rata-rata (Mean) adalah Rp.651,09 milyar, dengan standar deviasi (Std. Deviation) sebesar Rp.383,59 milyar.

Sedangkan nilai (Minimum) pada Retribusi Daerah adalah Rp.77,17 milyar, nilai maksimum (Maximum) adalah Rp.115,51 milyar, dan nilai rata-rata (Mean) adalah Rp.88,76 milyar, dengan standar deviasi (Std. Deviation) sebesar Rp.15,42 milyar.

Pada PAD nilai minimum (Minimum) yang diterima adalah Rp.372,42 milyar, nilai maksimum (Maximum) adalah Rp.1.442,78 milyar, dan nilai rata-rata (Mean) adalah Rp.812,20 milyar, dengan standar deviasi (Std. Deviation) sebesar Rp.437,42 milyar.

Sebelum menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan, maka dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu menggunakan SPSS 22. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan adalah uji Normalitas, Autokorelasi, Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan tes Kolmogorov - Smirnov. Berikut hasilnya:

Tabel 2. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	10.37566763
Most Extreme Differences	Absolute	.269
	Positive	.269
	Negative	-.236
Test Statistic		.269
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.200 lebih besar dari 0.05, hal tersebut menunjukkan bahwa data yang dipergunakan telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan lain pada model regresi. Metode pengujian yang digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (DW test) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000 ^a	1.000	1.000	4.97163	2.962

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: PAD

Dari hasil SPSS 22 menunjukkan bahwa uji Durbin-Watson (DW test) dalam pengujian ini sebesar 2.962. Berdasarkan tabel Durbin-Watson diketahui bahwa dl (batas bawah) = 0.3674, sedangkan dU (batas atas) = 2.2866. Maka, nilai DW berada pada $4 - dU$ ($4 - 2.2866 = 1.7134$) < DW (2.962) < $4 - dl$ ($4 - 0.3674 = 3.6326$) yang artinya masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan akan lebih baik.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan VIF. Multikolinearitas terjadi bila nilai *tolerance value* di bawah 0.10 atau nilai VIF tidak lebih dari 10. Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam tabel berikut:

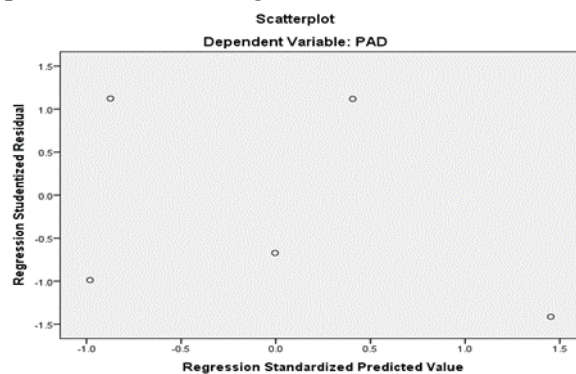
Tabel 7. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-58.955	59.304		-.994	.425		
Pajak Daerah	1.074	.035	.942	31.056	.001	.306	3.272
Retribusi Daerah	1.933	.860	.068	2.247	.154	.306	3.272

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa Tolerance Value variabel Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) yakni 0.306 lebih besar dari 0.10. Sementara itu, Nilai VIF variabel Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) yakni 3.272 lebih kecil dari 10.00. Sehingga dapat menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel-variabel bebas.

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *Scatterplot* berikut hasilnya:



Gambar 1. Scatterplot

Dari Scatterplot di atas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, juga tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit maka dapat disimpulkan pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan linear Antara dua variable atau lebih. Jika korelasi bernilai positif, maka hubungan Antara dua variabel bersifat searah. Sebaliknya, jika korelasi bernilai negatif, maka hubungan antara dua variabel bersifat berlawanan arah.

Tabel 8. Correlations

		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD
Pajak Daerah	Pears on Correlation	1	.833	.999**
	Sig. (2-tailed)		.080	.000
	N	5	5	5

Retribusi Daerah	Pearson Correlation	.833	1	.853
	Sig. (2-tailed)	.080		.066
	N	5	5	5
PAD	Pearson Correlation	.999**	.853	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.066	
	N	5	5	5

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2 -tailed).

Berdasarkan kriteria korelasi di atas, menunjukkan bahwa Pajak Daerah (X_1) menghasilkan angka 0.999** yang menunjukkan bahwa Pajak Daerah (X_1) terhadap PAD (X_2) mempunyai korelasi yang sangat kuat, dan mempunyai tanda bintang yang berarti bahwa semakin tinggi Pajak Daerah (X_1) maka semakin tinggi juga PAD (Y) yang diterima. Retribusi Daerah (X_2) menghasilkan angka 0.853 yang menunjukkan bahwa Retribusi Daerah (X_2) mempunyai korelasi yang sangat kuat terhadap PAD (Y), yang berarti bahwa semakin tinggi Retribusi Daerah (X_2) maka semakin tinggi juga PAD (Y).

4.2 Pembahasan

Perkembangan Pajak Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari tahun 2009-2013. Pencapaian dari target anggaran yang direncanakan dan yang direalisasikan dari tahun ke tahun juga cukup baik. Hanya saja pertumbuhan dari tahun 2011-2012 mengalami penurunan yang cukup rendah, dari tahun 2011 adalah 54.59% dan menurun di tahun 2012 adalah 18.85%. Perkembangan Pajak Daerah juga tentunya berdampak pada peningkatan PAD yang sangat berperan dalam menyokong dan sangat berpengaruh besar terhadap PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah Kota Bandung. Nilai rata - rata pada statistik deskriptif sebesar Rp.651,09 milyar. Berdasarkan hasil uji penelitian secara parsial, menyatakan bahwa Pajak Daerah mempengaruhi PAD dilihat dari tingkat signifikansi $0.000 < 0.05$ yang artinya terdapat korelasi yang signifikan. Dilihat juga bahwa t hitung $> t$ tabel yaitu $31.056 > 2.776$ dan mempunyai keterikatan sebesar 99.8% yang artinya Bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap PAD. Adapun faktor-faktor yang dapat menunjang tercapainya target tersebut antara lain adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pengalihan dari Pemerintah Pusat yang masuk ke komponen Pajak Daerah yang semakin lama harga tanah dan bangunan di Kota Bandung semakin diminati. Potensi penerimaan BPHTB juga akan selalu meningkat setiap tahunnya seiring dengan naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Begitu pula dengan Pajak Air Bawah Tanah yang semula dari Pajak Provinsi yang telah beralih menjadi Pajak Daerah kota.

Berbeda dengan Pajak Daerah, dilihat secara umum bahwa perkembangan dari retribusi daerah tiap tahun ke tahun tidak mencapai target bahkan secara umum tidak berpengaruh kuat terhadap PAD. Target anggaran pun berubah karena dari tahun ke tahun realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak mengalami kenaikan secara drastis, bahkan cenderung datar. Beberapa alasan penjelasan tidak tercapainya target Retribusi seperti, belum adanya penyesuaian tarif jasa kebersihan dengan biaya pengelolaan

kebersihan, kurangnya dukungan dari masyarakat, belum optimalnya pengelolaan potensi Retribusi Daerah, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan, kurangnya peran Retribusi Daerah yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah, kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, dan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Nilai rata-rata pada statistik deskriptif adalah Rp.88,76 milyar. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang menunjukkan tingkat pertumbuhan paling tinggi adalah tahun 2013 yaitu mencapai 25.11% sekaligus merupakan target perencanaan anggaran yang paling baik. Sedangkan tingkat pertumbuhan terendah adalah tahun 2011 yaitu -6.59%. Pada hasil output Retribusi Daerah yang menyatakan bila dilihat dari tingkat signifikansi $0.066 > 0.05$ yang artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan. Dilihat juga bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $2.247 < 2.776$ yang artinya juga tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Tetapi ditinjau dari tabel koefisien determinasi parsial menunjukkan nilai sebesar 72.8% yang berarti bahwa Retribusi Daerah mempunyai keterikatan atau keeratan diluar pajak, karena Retribusi Daerah merupakan bagian dari PAD diluar non pajak. Maka dari itu, optimalisasi sumber-sumber Retribusi Daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, misalnya dengan cara: memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, menerapkan sanksi bagi pedagang liar, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Peningkatan PAD Kota Bandung dari 2009-2013 pun meningkat seiring dengan perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi penerimaan PAD yang menunjukkan tingkat pertumbuhan paling tinggi ada di tahun 2011 mencapai 45.21% sedangkan realisasi penerimaan PAD yang menunjukkan tingkat pertumbuhan paling rendah ada di tahun 2010 yang hanya 15.42%. Rata-rata pertumbuhan penerimaan PAD Kota Bandung tahun 2009-2013 adalah sebesar 22.19%, sedangkan pada statistik deskriptif sebesar Rp.812,20 milyar. Dilihat dari tabel koefisien determinasi simultan menunjukkan nilai sebesar 99.9%.

Hasil dari SPSS menunjukkan R^2 sebesar 1 yang berarti PAD Kota Bandung seluruhnya hanya dipengaruhi oleh pajak dan retribusi daerah. Terkait dengan perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa secara umum perkembangan penerimaan PAD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun pengaruh Retribusi Daerah sangat kecil. Sangat tidak seimbang dengan Pajak Daerah yang mempunyai kontribusi kuat sedangkan Retribusi Daerah yang lemah. Walaupun penerimaan PAD secara garis besar mengalami peningkatan, hal ini perlu dijadikan perhatian khusus pada Pemerintah Daerah untuk membenahi ketidakseimbangan dari penerimaan khususnya pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandung.

5. PENUTUP

Secara umum bahwa perkembangan dari Retribusi Daerah Kota Bandung tiap tahun ke tahun tidak mencapai target. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang menunjukkan tingkat pertumbuhan paling tinggi adalah tahun 2013 yaitu mencapai

25.11% sebesar Rp.115.5 milyar dengan target anggaran Rp.100.8 milyar juga merupakan target perencanaan anggaran yang paling baik. Nilai rata-rata perkembangan Retribusi Daerah adalah 7.10% atau sebesar Rp.15,42 milyar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bandung. Secara simultan, PAD Kota Bandung 100% dipengaruhi oleh pajak dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS20. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampal Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Iskandar, Irham. 2012. Flypaper Effect pada Unconditional Grant. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 13 No. 1, Juni 2012, hlm. 113-131.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Priyatno, Duwi. 2012. Cara Kiat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono, 2009. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS Yogyakarta: CV Andi Offset
- Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia, Edisi 3. Jakarta-Barat: PT Indeks.
- Sunyoto, Danang. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Adi